

Peran Komunikasi Antar Generasi Dalam Membangun Literasi Digital

Lutfiyah Handayani¹, Feby Aditya Rachmayanti², Afqira Syafa'ati Sya'ban³, Ike Junita Triwardhani⁴

^{1,2,3,4} Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia
E-mail: upitop@gmail.com¹, febyadityarachmayanti@gmail.com², afqirasyafa8@gmail.com³, junitatriwardhani@gmail.com⁴

Article History:

Received: 25 Mei 2025

Revised: 04 Juni 2025

Accepted: 05 Juni 2025

Keywords:

Komunikasi Antargenerasi,
Literasi Digital,
Hoaks,
Kolaborasi Generasi,
Edukasi Masyarakat.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran komunikasi antargenerasi dalam membangun literasi digital sebagai strategi untuk menangkal penyebaran hoaks, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur. Di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, masyarakat dari berbagai kelompok usia menghadapi tantangan dalam menyaring dan memahami informasi yang beredar di media sosial. Perbedaan karakteristik antara generasi Baby Boomer, Generasi X, Milenial, hingga Generasi Z menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kemampuan mengakses, memahami, dan memverifikasi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih melek teknologi dan mampu menjadi fasilitator informasi digital bagi generasi yang lebih tua. Sementara itu, generasi yang lebih senior memiliki nilai-nilai kehati-hatian dan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam proses verifikasi informasi. Dinas Komunikasi berperan sebagai penghubung melalui pelatihan, kampanye edukatif, dan pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk mendorong keterlibatan publik. Kolaborasi antargenerasi terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dan memperkuat ketahanan terhadap hoaks. Dengan demikian, komunikasi antargenerasi menjadi elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif, kritis, serta tangguh menghadapi tantangan informasi digital di era modern.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Digitalisasi telah memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya adalah penyebaran berita hoaks. Berita hoaks atau informasi yang tidak benar seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, kepentingan politik, hingga menyebabkan kepanikan sosial (Wardle & Derakhshan, 2017). Tantangan ini semakin kompleks karena perbedaan pola komunikasi antargenerasi yang memiliki cara berbeda dalam mengakses, memahami, dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, komunikasi antargenerasi dalam meningkatkan literasi digital menjadi faktor penting dalam menangkal hoaks, khususnya di instansi pemerintahan yang bertanggungjawab atas pengelolaan informasi publik, seperti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur.

Menurut data *We Are Social* dan *Hootsuite* (2023), lebih dari 212,9 juta penduduk Indonesia menggunakan internet, yang mencakup sekitar 77 persen dari total populasi. Dari angka ini, sebanyak 95,4 persen pengguna internet mengakses media sosial, yang sering menjadi saluran utama penyebaran berita hoaks (Kemp, 2023). Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo, 2023) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari 11.000 berita hoaks telah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman serius dalam era digital, yang memerlukan strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan pegawai pemerintahan.

Di lingkungan kerja, perbedaan generasi dalam pola komunikasi menjadi tantangan tersendiri dalam menangani hoaks. Organisasi saat ini terdiri dari berbagai generasi, mulai dari Baby Boomers (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1980), Generasi Milenial (lahir 1981-1996), hingga Generasi Z (lahir setelah 1997) (Deal, Altman, & Rogelberg, 2010). Setiap generasi memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda. Generasi Baby Boomers (lahir 1946-1964) tumbuh tanpa kemudahan teknologi modern, sehingga lebih nyaman berkomunikasi secara tatap muka atau melalui media tradisional. Mereka cenderung memerlukan pendampingan dalam menggunakan perangkat digital. Generasi X (lahir 1965-1980) yang mengalami transisi dari analog ke digital sudah mulai terbiasa dengan komputer, namun masih mengutamakan komunikasi konvensional untuk informasi penting. Sedangkan Generasi Y atau Milenial (lahir 1981-1996) dan Generasi Z (lahir 1997-2012) lahir di era digital, sehingga gaya komunikasi mereka akrab dengan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform online. Kecenderungan ini berarti generasi muda lebih mudah mengakses informasi digital, sedangkan generasi tua perlu dukungan untuk mengikuti laju perubahan teknologi.

Dalam konteks Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, komunikasi antargenerasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami informasi, kurangnya kolaborasi dalam menangkal hoaks, serta rendahnya tingkat literasi digital di antara pegawai. Hal ini dapat menghambat efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam melawan berita bohong yang beredar di masyarakat. Penelitian oleh Raine et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan menangkal hoaks sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antargenerasi dalam lingkungan kerja. Jika generasi lebih senior kurang memahami teknologi digital, maka mereka akan lebih sulit mengenali berita bohong atau palsu. Sebaliknya, generasi muda yang lebih melek digital cenderung kurang kritis dalam menyaring informasi. Oleh karena itu, kolaborasi antargenerasi menjadi solusi utama dalam membangun literasi digital yang kuat di lingkungan kerja.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis pola komunikasi antargenerasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital serta strategi yang diterapkan dalam menangkalkan hoaks. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis; 1) Pola komunikasi antargenerasi terbentuk di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur; 2) Perbedaan pola komunikasi antar generasi mempengaruhi kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur; dan 3) Pemahaman terhadap pola komunikasi antar generasi penting dalam meningkatkan kolaborasi dan literasi digital.)

LANDASAN TEORI

Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. proses ini dapat berlangsung secara verbal (lisan atau tulisan) maupun nonverbal (gestur, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh) melalui berbagai saluran komunikasi. Menurut Mortensen (2020) bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok melalui simbol-simbol yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya West & Turner (2019) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu menggunakan simbol untuk menciptakan makna dalam lingkungan sosialnya. komunikasi adalah proses penyampaian lambang atau pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media atau secara langsung dengan tujuan tertentu (Ahmad Fadli, 2020). Komunikasi terdiri atas beberapa komponen pembentuknya, yang meliputi pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran komunikasi, penerima pesan, dan umpan balik (Hariyanto, 2021).

Komunikasi pada lembaga pemerintahan adalah proses penyampaian informasi, kebijakan, dan instruksi antara berbagai pihak dalam lingkungan pemerintahan, baik secara internal (antarpegawai dan unit kerja) maupun eksternal (dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya). Komunikasi ini berperan penting dalam memastikan transparansi, efektivitas kebijakan, serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk komunikasi dalam lembaga pemerintahan dapat berupa komunikasi formal melalui surat resmi, rapat, konferensi pers, maupun komunikasi digital melalui situs web dan media sosial. Komunikasi dalam lembaga pemerintahan, khususnya di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur, berperan krusial dalam menangani penyebaran hoaks. Sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam bidang komunikasi dan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian memiliki tugas untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat valid, akurat, dan dapat dipercaya.

Pola Komunikasi

Pola komunikasi adalah suatu pola hubungan yang terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait proses komunikasi yang sedang terjadi. Pola komunikasi adalah pola atau bentuk hubungan antara dua individu atau lebih dalam proses mengirim dan menerima pesan secara berulang sehingga isi pesan dapat dimengerti (Mayla, 2018). Pola komunikasi dibagi menjadi empat, yakni komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan komunikasi massa (Zaenal, 2020). Pola komunikasi adalah metode atau sistem yang digunakan individu maupun kelompok dalam melakukan komunikasi, yang berlandaskan pada berbagai teori komunikasi untuk menyampaikan pesan atau mempengaruhi penerima pesan (Purwasito Andrik, 2002).

Joseph A. Devito membagi pola komunikasi menjadi empat, yakni komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa (Devito, 2002). Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam (Everet M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Wiryanto, 2004). Menurut Devito (2002) dalam hubungannya penanggulangan hoaks menggunakan beberapa indikator diantaranya transparansi, kecepatan respon, kredibilitas komunikator, partisipasi publik, penggunaan multi platform. Dengan menerapkan indikator-indikator ini, instansi seperti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur dapat membangun pola komunikasi yang efektif dalam menangani hoaks dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Literasi Digital

Literasi Digital adalah kecakapan seseorang ketika mengoperasikan teknologi, informasi, dan komunikasi, mempunyai kemampuan bersosialisasi yang tinggi, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif. Lebih lanjut, seseorang yang mengerti tentang literasi digital merupakan seseorang yang bisa mengakses, mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, serta mengevaluasi sumber daya digital.

Menurut Irhandayaningsih (2020), bahwa literasi digital adalah keterampilan dasar seperti membaca, menulis, memahami simbol, serta kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer. kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital, termasuk dalam pembelajaran akademik dan praktik pembelajaran. Melalui literasi digital dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk bisa mencari, mendapatkan, serta menganalisis informasi yang tersebar di media digital. Sehingga memiliki tingkat perkembangan wawasan kebangsaan yang cukup baik. Semakin cepatnya kemajuan teknologi informasi serta komunikasi maka akan semakin cepat pula menghasilkan kemampuan literasi digital. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk mengerti bahwa literasi digital adalah hal yang sangat krusial dan sangat diperlukan di era sekarang. Sejalan dengan itu, setiap individu harus memiliki tanggung jawab mengenai penggunaan teknologi dengan baik.

Literasi digital mempunyai dua tujuan. *Pertama*, untuk menunjukkan bahwa literasi digital memiliki maksud untuk menjaga masyarakat Indonesia dari pengaruh negatif penggunaan media digital. *Kedua*, untuk memperlihatkan bahwa literasi digital bermaksud untuk menyiapkan masyarakat sebagai pengguna utama media digital. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi hoaks dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dalam bentuk literasi digital yaitu dengan cara menyebarkan nilai-nilai positif di media digital serta harus cerdas dalam hal literasi informasi.

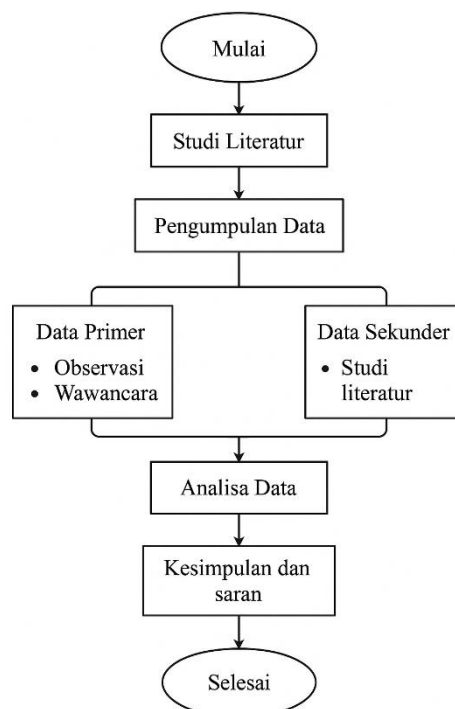
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdulkari bahwa "untuk mendapatkan serta membuat suatu informasi, maka seseorang harus mempunyai keterampilan literasi informasi yang baik". Menurut pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika ingin memperoleh suatu informasi maka harus mempunyai kemampuan literasi informasi yang baik agar tidak mudah terpecah oleh informasi yang beredar yang belum tentu benar. Selanjutnya, ketika akan membuat informasi maka harus memiliki kemampuan literasi informasi yang baik juga agar bisa membuat informasi yang dapat dipercaya dan dimengerti oleh masyarakat (Abdulkarim et al., n.d.) Oleh karena itu, kegiatan literasi digital harus terus diterapkan secara berkelanjutan dengan maksud dan tujuan untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta keterampilan seseorang menjadi lebih baik lagi. Jika seseorang sudah mempunyai tingkat literasi yang baik, maka dipastikan tidak hanya cerdas dalam mencari informasi, tetapi ketika memperoleh informasi akan dipahami dan dipelajari secara lebih mendalam. Adapun aspek literasi digital yang dikemukakan oleh Hague

dan Payton (2011) yang dijadikan indikator dalam variabel literasi digital diantaranya adalah kreativitas, berpikir kritis, pemahaman konteks sosial budaya, kolaborasi, kemampuan menemukan dan memilih informasi, komunikasi, keamanan elektronik, dan keterampilan.

METODE PENELITIAN (Times New Roman, size 12)

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1992) dalam Sujarweni (2014:19), mengungkapkan bahwa penelitaian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan, karena akan menganalisis secara spesifik pada objek penelitian tertentu, yaitu pola komunikasi antargenerasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur berperan dalam meningkatkan literasi digital dalam menghadapi hoaks. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis) melainkan juga memadukan (sintesis).

Penelitian ini bertujuan memahami pola komunukasi antargenerasi dalam lingkungan kerja, khususnya di Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik untuk literasi digital dan penanganan hoaks. Dengan metode pengumpulan data terdapat pada diagram alir pengumpulan data berikut:



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Berdasarkan hasil warancara, Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur memastikan transparansi melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan

masyarakat. Informasi disampaikan secara terbuka melalui media sosial, website resmi, dan forum publik. Kegiatan literasi digital turut mendukung pemahaman masyarakat atas informasi yang diterima

Tantangan:

(1) Perbedaan literasi digital antargenerasi

Perbedaan tingkat literasi digital antara generasi muda dan generasi tua menjadi tantangan utama dalam upaya membangun transparansi informasi. Generasi muda umumnya memiliki keunggulan dalam mengakses, memproses, dan membagikan informasi digital secara cepat. Sementara itu, generasi yang lebih tua cenderung mengalami hambatan dalam menavigasi platform digital, sehingga berpotensi tertinggal dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Kesenjangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penerimaan informasi publik yang disampaikan oleh institusi pemerintahan melalui kanal digital.

Kesenjangan ini juga berdampak pada efektivitas komunikasi antargenerasi dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai perantara informasi yang dapat menjembatani pemahaman generasi yang lebih tua. Namun, jika komunikasi tidak berlangsung secara dialogis dan saling menghargai, maka potensi konflik persepsi dan miskomunikasi justru meningkat. Oleh karena itu, strategi literasi digital perlu dirancang agar mampu memberdayakan semua kelompok usia, dengan memperhatikan pendekatan edukatif yang inklusif dan berbasis interaksi antargenerasi.

(2) Keterbatasan infrastruktur digital

Infrastruktur digital yang belum merata di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, turut menjadi kendala dalam membangun komunikasi yang transparan dan akses informasi yang setara. Kurangnya jaringan internet yang stabil, keterbatasan perangkat digital, dan minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan teknis yang relatif signifikan. Kondisi ini memperlemah jangkauan informasi publik yang disampaikan secara digital, sehingga masyarakat di wilayah tertentu menjadi kurang terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga memperlebar kesenjangan digital antargenerasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi. Ketika akses dasar terhadap informasi tidak tersedia, maka potensi untuk meningkatkan literasi digital menjadi semakin terbatas. Dalam konteks komunikasi antargenerasi, hal ini mengurangi kesempatan terjadinya transfer pengetahuan digital dari generasi muda kepada yang lebih tua, serta menurunkan efektivitas program literasi yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital yang merata merupakan prasyarat penting untuk mendukung keterbukaan dan partisipasi masyarakat lintas generasi.

(3) Penyebaran hoaks yang lebih cepat dari klarifikasi

Fenomena penyebaran hoaks yang berlangsung lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi resmi menjadi tantangan serius dalam menciptakan transparansi informasi. Dalam ekosistem digital yang sangat dinamis, informasi palsu dapat tersebar luas hanya dalam hitungan menit, terutama melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Hal ini menjadi lebih rumit ketika masyarakat, khususnya dari kelompok usia lanjut, belum memiliki keterampilan memadai untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi secara mandiri.

Komunikasi antargenerasi memiliki potensi untuk menjadi alat mitigasi terhadap penyebaran hoaks. Generasi muda yang lebih peka terhadap teknik verifikasi informasi digital dapat menjadi agen edukasi bagi generasi yang lebih tua. Namun, perbedaan persepsi dan kepercayaan terhadap sumber informasi sering kali menghambat proses ini. Dalam beberapa kasus, informasi dari keluarga atau lingkungan terdekat dianggap lebih kredibel dibandingkan klarifikasi resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu menekankan kolaborasi antar generasi dalam menyaring informasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kanal informasi resmi.



Gambar 2. Proses Transparansi Dalam Informasi

2. Kecepatan Respons

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian merespons hoaks secara cepat, terutama isu strategis. Verifikasi informasi dilakukan segera, dan klarifikasi disebarluaskan melalui media sosial. Namun, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kecepatan hoaks menyebar membuat proses ini perlu dukungan masyarakat.

Solusi:

(1) Optimalisasi media sosial

Pemanfaatan media sosial secara optimal menjadi salah satu strategi penting dalam merespons penyebaran hoaks dengan cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Media sosial memiliki karakteristik dinamis dan real-time yang memungkinkan instansi pemerintah menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada publik. Dalam konteks komunikasi antargenerasi, penggunaan berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok harus disesuaikan dengan karakteristik demografis audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh semua kelompok usia.

Namun demikian, optimalisasi media sosial juga memerlukan pendekatan strategis yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif. Konten yang dibuat harus mampu menarik perhatian, mudah dipahami, dan dapat dibagikan ulang oleh masyarakat, termasuk oleh generasi muda yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan digital mereka. Dengan begitu, generasi muda dapat menjadi simpul penyebaran informasi yang valid dan membantu menjangkau generasi yang lebih tua melalui komunikasi interpersonal dalam keluarga atau komunitas.

(2) Kolaborasi dengan relawan digital

Kolaborasi antara pemerintah dan relawan digital menjadi salah satu pendekatan partisipatif yang efektif dalam mengatasi keterbatasan SDM. Relawan digital, terutama yang berasal dari kalangan generasi muda, dapat membantu proses verifikasi informasi dan distribusi klarifikasi secara cepat di berbagai platform digital. Mereka berperan

sebagai mitra strategis yang mendukung respons pemerintah terhadap isu-isu hoaks yang bersifat lokal maupun nasional.

Selain itu, keterlibatan relawan digital juga menciptakan ruang kolaboratif antar generasi dalam upaya membangun kesadaran literasi digital. Dengan pelatihan yang tepat, relawan dapat mendampingi anggota masyarakat dari generasi yang lebih tua untuk mengidentifikasi hoaks dan mengakses kanal informasi yang terpercaya. Proses ini bukan hanya mempercepat distribusi klarifikasi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat secara kolektif dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

(3) Penanganan berbasis waktu nyata (real-time)

Penanganan hoaks secara real-time menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks komunikasi digital yang berlangsung sangat cepat. Upaya ini menuntut sistem monitoring informasi yang responsif dan terintegrasi dengan berbagai kanal digital. Pemerintah daerah mulai mengembangkan mekanisme pelaporan masyarakat yang memungkinkan deteksi dini terhadap isu yang berpotensi menyesatkan, sehingga klarifikasi dapat segera disiapkan dan disebarluaskan secara luas sebelum hoaks menyebar lebih jauh.

Dalam implementasinya, pendekatan real-time juga membutuhkan sinergi komunikasi antargenerasi. Generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi dapat menjadi mata dan telinga digital bagi komunitasnya, sementara generasi yang lebih tua dapat menjadi penguat pesan kebenaran di lingkungan sosial mereka. Dengan kerja sama lintas usia yang berbasis pada rasa tanggung jawab bersama, sistem penanganan informasi dapat bergerak lebih cepat dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat secara merata.



Gambar 3. Kecepatan respons terhadap Hoax

3. Kredibilitas Komunikator

Informasi yang disampaikan telah diverifikasi dan menggunakan sumber resmi. Keberadaan juru bicara dan akun resmi pemerintah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap klarifikasi yang diberikan.

Upaya Penguatan:

(1) Konsistensi pesan

Konsistensi dalam penyampaian pesan menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kredibilitas komunikator, khususnya dalam konteks komunikasi publik. Ketika informasi disampaikan secara konsisten oleh berbagai kanal resmi, masyarakat cenderung lebih percaya dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Hal ini semakin penting dalam era digital, di mana komunikasi berlangsung cepat dan pesan yang tidak seragam dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi kelompok usia yang belum terbiasa dengan dinamika informasi digital.

Dalam komunikasi antargenerasi, konsistensi pesan juga berperan sebagai penghubung pemahaman antara kelompok usia yang berbeda. Generasi muda sering kali menjadi penerima awal informasi digital dan bertugas secara tidak langsung menyaring serta menyampaikan ulang informasi kepada generasi yang lebih tua. Jika informasi dari pemerintah tidak konsisten, proses transfer antar generasi ini akan terganggu, bahkan berpotensi memperbesar jarak kepercayaan terhadap institusi resmi. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk menjaga keseragaman narasi, baik dalam konten visual maupun verbal, di seluruh kanal komunikasi.

(2) Sumber data terpercaya

Penggunaan sumber data yang dapat diverifikasi dan diakui secara publik adalah elemen kunci dalam meningkatkan kredibilitas komunikator. Dalam konteks literasi digital, masyarakat semakin menaruh perhatian pada asal-usul data yang disampaikan. Ketika informasi merujuk pada data statistik resmi, lembaga riset independen, atau dokumen kebijakan yang dapat diakses publik, kepercayaan terhadap informasi meningkat secara signifikan. Hal ini mendorong masyarakat, termasuk kelompok usia lanjut, untuk mulai memahami pentingnya memverifikasi sumber sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.

Keberadaan sumber data yang jelas juga menjadi jembatan edukatif antar generasi. Generasi muda yang terbiasa mencari referensi digital dapat berperan dalam menjelaskan atau membantu generasi yang lebih tua dalam memahami latar belakang suatu informasi. Ini menciptakan ruang kolaboratif di mana informasi tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga menjadi bahan diskusi dan pembelajaran bersama. Komunikasi semacam ini mendorong peningkatan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kritis dan reflektif.

(3) Komunikasi dua arah dengan masyarakat

Peningkatan kredibilitas tidak hanya bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan komunikator untuk mendengarkan respons masyarakat. Komunikasi dua arah memungkinkan terjadinya dialog, klarifikasi langsung, dan penyesuaian pesan berdasarkan kebutuhan serta persepsi publik. Melalui fitur interaktif di media sosial atau forum diskusi publik, masyarakat dapat menyampaikan masukan atau pertanyaan, dan pihak berwenang memiliki kesempatan untuk merespons secara tepat dan membangun hubungan yang lebih partisipatif.

Dalam kerangka komunikasi antargenerasi, pendekatan dua arah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan diterima secara utuh oleh semua kelompok usia. Generasi muda dapat mengajukan pertanyaan yang bersifat teknis atau kritis, sementara generasi yang lebih tua mungkin memerlukan penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana. Respons yang disesuaikan dengan karakteristik audiens menunjukkan adanya empati dan pemahaman dari komunikator, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pesan serta meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi yang menyampaikan informasi.



Gambar 4. Kredibilitas Komunikator

4. Partisipasi Publik

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaporan hoaks, penyebaran klarifikasi, dan kegiatan literasi digital. Meskipun belum ada program formal, partisipasi publik terjadi secara sukarela.

Cara Meningkatkan:

(1) Pelatihan formal

Pelatihan formal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital, terutama terkait deteksi hoaks dan penyebaran klarifikasi. Pelatihan ini dapat diberikan secara terstruktur oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, atau mitra komunitas, dengan kurikulum yang mencakup teknik verifikasi informasi, penggunaan media digital secara etis, serta keterampilan komunikasi efektif lintas usia. Melalui pendekatan sistematis ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor yang aktif dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.

Pelatihan ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat komunikasi antargenerasi. Generasi muda yang telah mengikuti pelatihan dapat menjadi fasilitator bagi anggota keluarga atau komunitas yang lebih tua, sehingga terjadi transfer pengetahuan yang bersifat timbal balik. Selain meningkatkan literasi digital, interaksi ini memperkuat kohesi sosial dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran setiap individu dalam ekosistem informasi. Pelatihan formal yang bersifat inklusif dapat menjadi landasan kuat bagi partisipasi publik yang berkelanjutan dan berdampak luas.

(2) Pembentukan relawan digital

Pembentukan relawan digital merupakan inisiatif penting dalam memperluas jaringan distribusi informasi yang benar dan melawan penyebaran hoaks secara cepat. Relawan digital berperan sebagai agen literasi yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas, khususnya di ranah media sosial. Dengan pelatihan dan pembekalan yang memadai, mereka dapat membantu menjawab pertanyaan publik, mengedukasi lingkungan sekitar, dan memperkuat kanal informasi resmi dengan cara yang lebih dekat dan kontekstual.

Relawan digital juga dapat difungsikan sebagai penghubung antargenerasi dalam komunitas. Misalnya, seorang relawan muda dapat mendampingi kelompok lansia dalam memahami dan menggunakan aplikasi pesan, memeriksa kebenaran informasi, atau mengikuti kegiatan literasi daring. Kolaborasi ini membuka ruang pembelajaran lintas usia dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap ekosistem informasi yang sehat. Dengan dukungan pemerintah atau lembaga terkait, keberadaan relawan digital akan menjadi elemen vital dalam pembangunan literasi digital berbasis partisipasi masyarakat.

(3) Pelibatan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, khususnya dalam komunitas yang masih mengandalkan komunikasi lisan atau tradisional. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan literasi digital dan klarifikasi informasi, pesan-pesan penting dari pemerintah atau lembaga resmi akan lebih mudah diterima oleh kelompok yang mungkin belum aktif secara digital. Kredibilitas yang dimiliki para tokoh ini menjadi jembatan strategis untuk menjangkau generasi yang lebih tua atau masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses digital.

Pelibatan tokoh masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi antar generasi melalui pendekatan budaya dan sosial yang lebih familiar. Mereka dapat menjadi fasilitator diskusi lintas usia dalam berbagai forum komunitas, menyampaikan pentingnya verifikasi informasi, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pelaporan hoaks. Pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan memperluas ruang dialog antara kelompok usia berbeda, sehingga literasi digital tidak hanya tumbuh secara teknis, tetapi juga secara sosial dan nilai-nilai kebersamaan.

5. Penggunaan Multiplatform

Dinas menggunakan berbagai media sosial untuk menjangkau beragam audiens:

(1) Instagram dan TikTok: konten visual

Instagram dan TikTok merupakan platform yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan melalui format visual yang singkat, menarik, dan mudah dipahami. Pemerintah daerah memanfaatkan kedua media ini untuk menyampaikan kampanye literasi digital, informasi layanan publik, serta klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar. Penggunaan elemen visual seperti infografik, video singkat, dan animasi interaktif terbukti mampu menarik perhatian, khususnya generasi muda yang mendominasi pengguna kedua platform tersebut. Karakter visual ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan daya ingat terhadap pesan yang disampaikan.

Dalam konteks komunikasi antargenerasi, konten visual di Instagram dan TikTok berfungsi sebagai alat bantu edukatif yang dapat diteruskan oleh generasi muda kepada generasi yang lebih tua. Misalnya, seorang remaja yang melihat video klarifikasi di TikTok dapat menyampaikan ulang informasi tersebut dalam percakapan keluarga, membantu orang tuanya memahami isu dengan cara yang lebih ringan dan tidak teknis. Interaksi semacam ini memperkuat fungsi multiplatform sebagai jembatan antar usia dalam membangun pemahaman kolektif terhadap informasi yang benar.

(2) Facebook: informasi edukatif

Facebook masih menjadi platform dominan bagi kelompok usia menengah ke atas, khususnya di kalangan orang tua dan masyarakat di wilayah semi-perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah daerah memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan informasi edukatif yang lebih rinci, seperti artikel literasi digital, panduan mengenali hoaks, dan pengumuman kebijakan publik. Format teks yang lebih panjang dan fitur grup komunitas memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih mendalam serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik.

Facebook juga menjadi ruang yang potensial untuk membangun komunikasi dua arah antargenerasi. Generasi yang lebih tua cenderung merasa lebih nyaman menggunakan Facebook, dan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam diskusi, memberikan pendampingan digital, atau bahkan menjadi moderator komunitas daring. Dengan demikian, Facebook tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga ruang kolaboratif yang memperkuat interaksi sosial lintas usia dalam konteks literasi digital.

(3) X (Twitter): klarifikasi cepat

Platform X (sebelumnya Twitter) digunakan untuk menyampaikan klarifikasi informasi secara cepat dan langsung kepada publik, terutama dalam merespons isu strategis atau hoaks yang sedang viral. Karakter platform ini yang berbasis teks singkat dan bersifat real-time sangat cocok untuk komunikasi krisis dan pembaruan informasi

yang bersifat mendesak. Pemerintah daerah memanfaatkan akun resmi untuk menyampaikan pernyataan klarifikasi, tautan ke sumber resmi, dan penegasan ulang atas fakta-fakta penting.

Meskipun tidak sepopuler Instagram atau TikTok di kalangan generasi muda, dan kurang digunakan oleh generasi lebih tua, X tetap menjadi kanal penting dalam strategi multiplatform karena kecepatan dan jangkauan diskusinya. Generasi muda yang aktif di platform ini sering kali menjadi pihak pertama yang menerima klarifikasi dan dapat menyebarkannya kembali ke lingkungan sekitarnya. Dalam konteks komunikasi antar generasi, peran generasi muda sebagai penyambung informasi dari X ke platform lain atau secara langsung ke anggota keluarga menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem informasi yang sehat dan cepat merespons isu.

Strategi ini memungkinkan segmentasi pesan berdasarkan usia dan gaya komunikasi.



Gambar 5. Strategi Multi-Platform

6. Pola Komunikasi Antargenerasi

Komunikasi lintas usia menjadi kunci keberhasilan. Generasi muda menjadi agen digital, sedangkan generasi tua menanamkan kehati-hatian dalam menyikapi informasi.

Manfaat:

(1) Percepatan klarifikasi

Pola komunikasi antargenerasi memungkinkan proses klarifikasi informasi berlangsung lebih cepat dalam lingkup keluarga maupun komunitas. Generasi muda, yang cenderung lebih aktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sering kali menjadi pihak pertama yang menerima informasi resmi atau klarifikasi dari kanal digital. Melalui komunikasi interpersonal, informasi tersebut kemudian diteruskan kepada anggota keluarga yang lebih tua, sehingga klarifikasi bisa menjangkau kelompok usia yang mungkin tidak mengakses informasi secara langsung dari internet.

Proses ini memperkuat rantai distribusi informasi dalam konteks lokal, tanpa bergantung sepenuhnya pada kanal institusional. Ketika klarifikasi dapat segera diterima dan dipahami oleh semua generasi, potensi penyebaran hoaks dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, komunikasi antar generasi menciptakan ikatan sosial yang lebih erat dan membentuk pola komunikasi yang responsif, kolaboratif, serta berbasis kepercayaan antar anggota keluarga atau komunitas.

(2) Pembelajaran lintas usia

Komunikasi antar generasi menciptakan ruang pembelajaran dua arah yang saling menguatkan. Generasi muda dapat mengajarkan penggunaan teknologi digital, cara

memverifikasi informasi, dan memperkenalkan berbagai platform berita terpercaya kepada generasi yang lebih tua. Sebaliknya, generasi tua dapat berbagi nilai kehati-hatian, refleksi kritis terhadap informasi, serta pengalaman dalam menyikapi dinamika sosial dan politik, yang sering kali luput dari perspektif generasi muda.

Pembelajaran lintas usia ini memperkaya pemahaman setiap individu terhadap dunia digital, tidak hanya dalam hal teknis tetapi juga etis. Dengan adanya saling percaya dan saling belajar, proses ini membentuk kultur literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hubungan antar generasi tidak hanya memperkuat solidaritas keluarga, tetapi juga menjadi model sosial yang dapat direplikasi dalam komunitas yang lebih luas, mempercepat penguatan literasi digital secara kolektif.

(3) Budaya verifikasi dan kehati-hatian

Pola komunikasi antar generasi turut membentuk budaya verifikasi informasi yang lebih kuat. Generasi tua, yang dikenal lebih berhati-hati dalam menyikapi berita, sering kali mengingatkan pentingnya tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi sebelum jelas kebenarannya. Sikap ini dapat memengaruhi generasi muda untuk tidak terlalu terburu-buru dalam membagikan konten digital, terutama yang bersifat sensasional atau belum terkonfirmasi.

Sebaliknya, generasi muda dapat mengajarkan cara-cara verifikasi digital seperti pengecekan fakta melalui situs resmi, penggunaan mesin pencari, atau pemeriksaan metadata gambar dan video. Interaksi semacam ini membangun kesadaran bersama bahwa kehati-hatian dan keterampilan teknis perlu berjalan seiring dalam menghadapi tantangan informasi digital. Dengan begitu, pola komunikasi antar generasi bukan hanya mempercepat penyebaran klarifikasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya kritis yang menjadi landasan dari literasi digital yang sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi antargenerasi memiliki peran penting dalam membangun literasi digital. Interaksi antara generasi tua dan muda terbukti dapat menjawab tujuan penelitian, yakni meningkatkan pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi digital pada masyarakat lebih luas. Secara eksplisit, temuan menunjukkan bahwa generasi muda dapat mentransfer pengetahuan teknis dan penggunaan media baru kepada generasi tua, sementara generasi tua memberikan konteks dan nilai-nilai yang memperkaya konten digital yang dikonsumsi. Dengan demikian, tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi peran komunikasi antargenerasi dalam literasi digital telah terjawab: jembatan komunikasi lintas usia memperkuat kompetensi literasi digital secara kolektif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Kajian ini bersifat kualitatif dan mengandalkan literatur yang ada; data empiris lapangan masih terbatas. Penelitian lebih mendalam dengan metode survei atau eksperimen diperlukan untuk mengukur dampak spesifik intervensi komunikasi antargenerasi pada peningkatan literasi digital. Selain itu, fokus konteks lokal dan budaya dapat berpengaruh, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya generalisasi ke semua daerah.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi empiris yang melibatkan responden dari berbagai generasi secara langsung. Penelitian kuantitatif dapat memberikan bukti kuat mengenai efektivitas strategi komunikasi tertentu (misalnya, pelatihan lintas generasi atau mentor teknologi). Disarankan pula meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi literasi digital, seperti akses infrastruktur, sikap psikologis, dan kebijakan pendidikan, agar intervensi yang

dirancang lebih komprehensif. Dengan demikian, studi lanjutan diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang sinergi komunikasi antargenerasi dalam memperluas literasi digital masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkarim, A., Ratmaningsih, N., & Anggraini, D. N. (n.d.). Developing Civicpedia as a Civic Education E-Learning Media To Improve Students' Information Literacy. In www.jsser.org *Journal of Social Studies Education Research Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi* (Vol. 2018, Issue 3). www.jsser.org
- DeVito, J. A. (2002). Human communication: The basic course (10th ed.). Pearson Education.
- Fadli, A. (2020). Dasar-dasar komunikasi: Teori dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pustaka Ilmu.
- Hariyanto. (2021). Komunikasi dalam organisasi pemerintahan: Konsep dan implementasi. Penerbit Media Nusantara.
- Mayla, S. (2018). Pola Komunikasi dalam Komunitas Virtual Pengemudi Transportasi Online.
- Mortensen, C. D. (2020). Foundations of communication theory. Academic Press.
- Mukaro, Z. (2020). Teori-Teori Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Purwasito, A. (2002). Komunikasi Multikultural: Budaya dan Gaya Hidup Masyarakat Urban. Penerbit LKiS.
- Rogers, E. M., & Kincaid, L. (1981). Communication networks: Toward a new paradigm for research. The Free Press.
- West, R., & Turner, L. H. (2019). Introducing communication theory: Analysis and application (6th ed.). McGraw-Hill.
- Wiryanto. (2004). Pengantar ilmu komunikasi. Penerbit Grasindo.